HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME

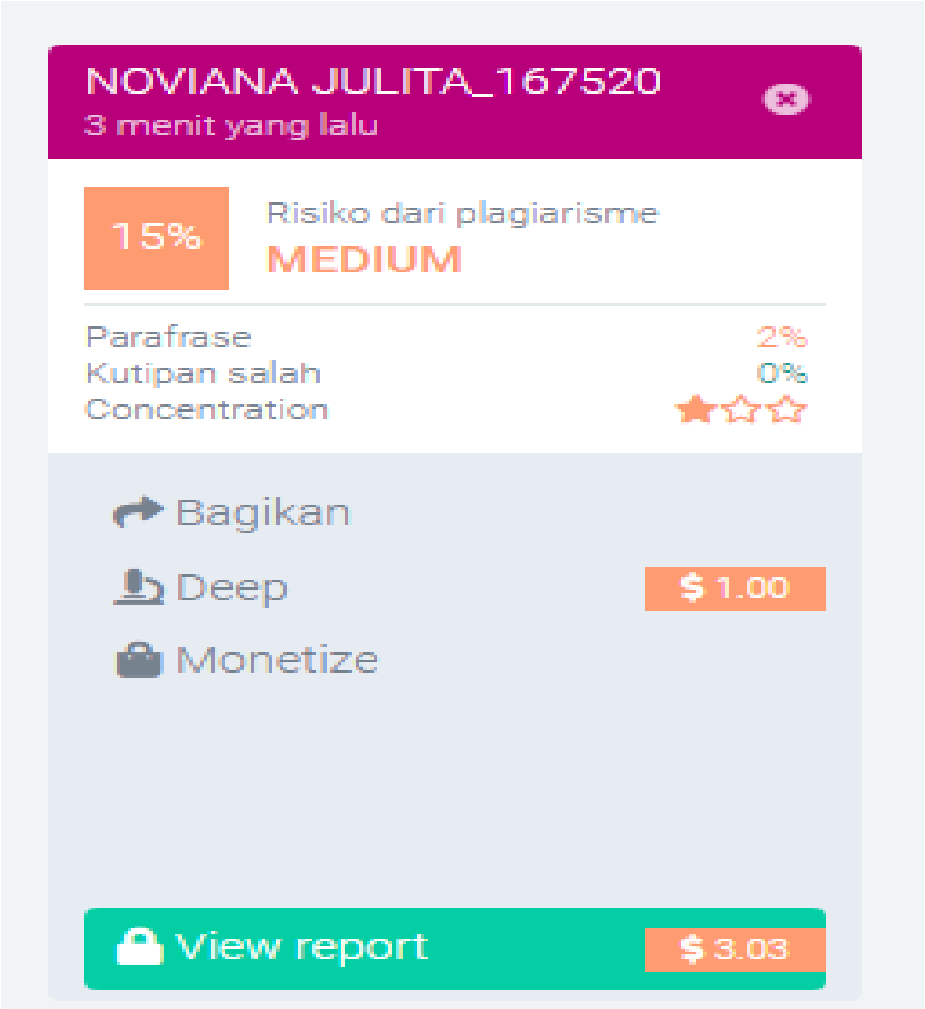

Nama File : NOVIANA JULITA_16752039

File diperiksa pada : 18 Agustus 2019

Tingkat Plagiarisme : 15%

PENILAIAN KINERJA KEUANGAN BLUD MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN PADA RSUD ABC BERDASARKAN PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-36/PB/2016

Noviana Julita[1], Arif Makhsun[2], Endang Asliana[3]
Program Studi Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis
Politeknik Negeri Lampung
Email : *novianajulita05@gmail.com*

Abstrak

Tujuan yang hendak penulis capai dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan RSUD ABC periode 2017-2018 setelah menerapkan PPK BLUD dengan fleksibilitas keuangan yang dimiliki. Penilaian kinerja keuangan dilakukan terhadap laporan keuangan RSUD ABC dengan teknik analisis rasio keuangan yang disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016. Analisis rasio keuangan yang diterapkan yaitu Rasio Kas, Rasio Lancar, Rasio Periode Penagihan Piutang, Rasio Perputaran Aset Tetap, Rasio Imbalan atas Aset Tetap, Imbalan Ekuitas, Perputaran Persediaan, Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional, dan Rasio Subsidi Biaya Pasien. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode kuantitatif dan vertikal dengan data sekunder. Data berupa Laporan Neraca dan Laporan Operasional kemudian dianalisis dengan teknik analisis rasio keuangan. Hasil analisis menunjukkan capaian kinerja keuangan RSUD ABC untuk tahun 2017 dan 2018 sebesar 14,47% dan 34,21% dari total skor maksimum yang ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 untuk penilaian kinerja keuangan sub aspek rasio keuangan. Artinya, kinerja keuangan RSUD ABC tergolong tidak baik, sehingga RSUD ABC perlu memperbaiki pengelolaan keuangan untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan di masa depan.

Kata Kunci : *AnalisisRasio Keuangan, Kinerja Keuangan, PPK BLUD*

---

[1] Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung
[2] Dosen Program Studi Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung
[3] Dosen Program Studi Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung

PENDAHULUAN

Reformasi administrasi sektor publik semakin berkembang di Indonesia. Salah satunya, berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya guna menyejahterakan rakyat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi landasan bagi instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang memiliki fleksibilitas tetapi tetap mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi instansi pemerintah daerah untuk menerapkan sistem keuangan yang fleksibel yaitu dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Penerapan PPK BLUD bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitasnya. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menjelaskan bahwa BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Salah satu instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu instansi milik pemerintah daerah yang dapat memiliki fleksibilitas keuangan melalui penerapan PPK BLUD.

Penerapan PPK BLUD tersebut menjadikan rumah sakit sebagai lembaga sosial yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, namun tetap dapat memperoleh keuntungan dari pelayanan yang diberikan. Selain itu, instansi yang telah menerapkan PPK BLUD juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, meningkatkan kinerja keuangan, serta meningkatkan kinerja manfaat sesuai dengan persyaratan administrasi BLUD.

Evaluasi dan penilaian kinerja salah satunya kinerja keuangan perlu dilakukan terhadap instansi yang telah menerapkan PPK BLUD sebagai bentuk pengawasan atas penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD dengan fleksibilitas keuangan yang diberikan. Hasil dari penilaian kinerja keuangan dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai

tingkat keberhasilan manajemen, dan juga sebagai dasar bagi instansi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja keuangan di masa yang akan datang.

Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan menilai laporan keuangan menggunakan teknik analisis. Salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja keuangan adalah teknik analisis rasio keuangan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan, analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan pos-pos tertentu pada elemen laporan keuangan. Rasio keuangan yang digunakan adalah Rasio Kas *(Cash Ratio)*, Rasio Lancar *(Current Ratio)*, Periode Penagihan Piutang *(Collection Period)*, Perputaran Aset Tetap *(Fixed Asset Turnover)*, Imbalan atas Aset Tetap *(Return on Fixed Asset*), Imbalan Ekuitas *(Return on Equity)*, Perputaran Persediaan *(Inventory Turnover)*, Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional, dan Rasio Subsidi Biaya Pasien.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ABC merupakan instansi yang telah menerapkan PPK BLUD. Penilaian kinerja keuangan perlu dilakukan pada RSUD ABC untuk melihat kemampuan rumah sakit dalam memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan. Hasil dari penilaian kinerja keuangan diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi instansi untuk pengambilan keputusan agar kinerja keuangan yang dihasilkan oleh manajemen lebih baik di masa depan, karena meningkatkan kinerja keuangan merupakan salah satu kewajiban instansi yang sudah menerapkan PPK BLUD.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat pentingnya penilaian kinerja keuangan sebagai bentuk pengawasan terhadap instansi yang menerapkan PPK BLUD, sehingga penulis mengambil judul **"Penilaian Kinerja Keuangan BLUD Menggunakan Rasio Keuangan Pada RSUD ABC Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016".**

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan RSUD ABC menggunakan analisis rasio keuangan setelah menerapkan PPK BLUD untuk periode 2017-2018.

METODE PELAKSANAAN

Bahan dan Alat

Bahan yang penulis gunakan yaitu Laporan Neraca dan Laporan Operasional RSUD ABC periode 2017-2018. Data tersebut penulis peroleh

dari PT Syncore Indonesia sebagai konsultan pendamping, yang diolah menggunakan alat berupa *laptop* dengan aplikasi *Microsoft Excel*.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi dengan data sekunder. Artinya, data yang penulis gunakan diperoleh secara tidak langsung dari pihak lain.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan terdiri dari 2 metode, yaitu menggunakan analisis kuantitatif dan metode analisis vertikal. Data kemudian dianalisis dengan beberapa rasio keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016. Langkah-langkah yang digunakan dalam penilaian kinerja keuangan ini, yaitu :

a. Melakukan perhitungan rasio keuangan terhadap Laporan Neraca dan Laporan Operasional periode 2017-2018. Kemudian, memberi skor pada nilai rasio yang dihasilkan. Rasio dan skor dalam penilaian kinerja keuangan disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016.
b. Menjumlahkan skor yang diperoleh. Skor tersebut disesuaikan dengan indikator yang ada pada penilaian kinerja aspek keuangan sub aspek rasio keuangan. Kemudian, mengukur tingkat pencapaian kinerja keuangan, dengan cara membandingkan total skor yang hasilkan dengan skor maksimum yang ditetapkan, sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Total skor yang diperoleh dari hasil perhitungan analisis rasio}}{\textit{Total skor indikator}} \times 100\%$$

Keterangan : Total skor indikator adalah 19, yaitu total skor yang ada pada aspek keuangan sub aspek rasio keuangan.

c. Menarik kesimpulan hasil penilaian kinerja keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat RSUD ABC

RSUD ABC merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Batang, yang didirikan pada tahun 1957. RSUD ABC menerapkan PPK BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 445.8/380/2011.

Analisis Rasio Keuangan

Teknik analisis rasio keuangan digunakan untuk melakukan penilaian kinerja keuangan terhadap laporan keuangan RSUD ABC. Penilaian kinerja keuangan diukur berdasarkan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 pada sub aspek rasio keuangan. Analisis dilakukan terhadap Laporan Operasional dan Neraca yang dihasilkan RSUD ABC tahun 2017-2018. Hasil analisis akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki instansi, tahap-tahap dalam melakukan penilaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung Rasio Kas *(Cash Ratio)*

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Kas

Tahun	Kas dan Setara Kas (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio Kas (%)	Naik/ (Turun)	Skor
2017	6.795.934.706,00	23.604.393.446,00	28,79%	(23,94)	0,25
2018	1.175.938.422,00	24.264.707.187,00	4,85%		0,25

Sumber : Laporan Neraca RSUD ABC, data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat hasil perhitungan Rasio Kas selama periode 2017-2018. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio untuk tahun 2017 sebesar 28,79% dan pada tahun 2018 sebesar 4,85%. Nilai Rasio Kas pada tahun 2018 menurun sebesar 23,94%. Menurunnya nilai rasio pada tahun 2018 mengindikasikan kemampuan instansi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki semakin buruk. Persentase yang ditunjukkan pada hasil perhitungan tersebut sama-sama menghasilkan skor 0,25 karena berada pada tingkat RK $\leq$ 60 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016.

2. Menghitung Rasio Lancar *(Current Ratio)*

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Lancar

Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio Lancar (%)	Naik/ (Turun)	Skor
2017	28.308.969.447,33	23.604.393.446,00	119,93	(26,31)	0,25
2018	22.715.999.095,63	24.264.707.187,00	93,62		0,25

Sumber : Laporan Neraca RSUD ABC, data diolah (2019)

Berdasarkan tabel perhitungan Rasio Lancar, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan untuk periode 2017-2018 menunjukkan penurunan nilai rasio sebesar 26,31% pada tahun 2018. Penurunan nilai rasio terjadi

dikarenakan menurunnya jumlah aset lancar berupa kas dan piutang yang dimiliki RSUD ABC, dan meningkatnya jumlah kewajiban jangka pendek. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa kemampuan RSUD ABC dalam melunasi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilki semakin buruk, artinya RSUD ABC memiliki kemampuan yang kurang baik dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Hal tersebut juga terlihat dari masing-masing skor yang dihasilkan yaitu 0,25 dari skor maksimum 2,5. Persentase yang dihasilkan untuk tahun 2017 dan 2018 mendapatkan skor 0,25 berada di tingkatan nilai $0 < RL \leq 120$.

3. Menghitung Rasio Periode Penagihan Piutang *(Collection Period Ratio)*

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Periode Penagihan Piutang

Tahun	Piutang Usaha x 360 (Rp)	Pendapatan Usaha (Rp)	Rasio Periode Penagihan Piutang (Hari)	Naik/ (Turun)	Skor
2017	5.798.347.607.880	22.971.678.809	252,41	(179,15)	0
2018	5.512.388.390.280	75.243.978.895	73,26		0,5

Sumber : Neraca dan Laporan Operasional RSUD ABC, data diolah (2019)

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan Rasio Periode Penagihan Piutang selama periode 2017-2018 menunjukkan perubahan yang signifikan yaitu penurunan nilai rasio sebesar 179,15 dari 2017 ke 2018. Semakin kecil nilai rasio yang dihasilkan, maka semakin besar skor yang diperoleh. Menurunnya nilai rasio menunjukkan kemampuan instansi dalam menagih piutang dalam satu periode semakin baik. Skor yang diperoleh untuk tahun 2017 adalah 0 karena berada pada tingkat $PPP \geq 100$, sedangkan tahun 2018 memperoleh skor 0,5 berada pada tingkat nilai $60 \leq PPP < 80$.

4. Menghitung Rasio Perputaran Aset Tetap *(Fixed Asset Turn Over)*

Tabel 4. Hasil Perhitungan Perputaran Aset Tetap

Tahun	Pendapatan Operasional (Rp)	Aset Tetap (Rp)	Rasio Perputaran Aset Tetap (%)	Naik/ (Turun)	Skor
2017	23.146.087.763,35	157.948.479.978,00	14,65	30,95	1
2018	76.725.261.080,18	168.236.213.242,00	45,61		2

Sumber : Neraca dan Laporan Operasional RSUD ABC, data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan Rasio Perputaran Aset Tetap selama periode 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 30,95% dari tahun sebelumnya, hal itu disebabkan karena adanya peningkatan yang cukup tinggi pada pendapatan jasa layanan yang dihasilkan oleh rumah sakit. Hasil perhitungan juga menunjukkan RSUD ABC memiliki tingkat efisiensi yang cukup tinggi pada tahun 2018 dalam penggunaan aset tetap yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dalam satu periode. Persentase 2017 pada tingkatan 10 < PAT ≤ 15 sehingga memperoleh skor 1, dan periode 2019 berada pada tingkatan maksimal PAT > 20 memperoleh skor 2 yang merupakan skor maksimum untuk rasio ini.

5. Menghitung Imbalan atas Aset Tetap *(Return on Fixed Asset)*

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Imbalan atas Aset Tetap

Tahun	Surplus/Defisit sebelum Pos Keuntungan/Kerugian (Rp)	Aset Tetap (Rp)	Imbalan atas Aset Tetap (%)	Naik/ (Turun)	Skor
2017	-49.324.546.140,65	157.948.479.978,00	-31,23	15,23	-
2018	-26.920.670.195,19	168.236.213.242,00	-16,00		-

Sumber : Neraca dan Laporan Operasional RSUD ABC, data diolah (2019)

Berdasarkan tabel hasil perhitungan Rasio Imbalan atas Aset Tetap RSUD ABC selama 2 tahun terakhir, nilai rasio yang dihasilkan di bawah 1 sehingga menunjukkan kemampuan rumah sakit yang sangat rendah dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan keuntungan. Rendahnya nilai rasio yang dihasilkan karena RSUD ABC mengalami defisit yang cukup tinggi selama tahun 2017 dan 2018.

6. Menghitung Rasio Imbalan atas Ekuitas *(Return on Equity)*

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Imbalan Ekuitas

Tahun	Surplus/Defisit sebelum Pos Keuntungan/Kerugian (Rp)	Ekuitas-Surplus/Defisit sebelum Pos Keuntungan/kerugian (Rp)	Imbalan atas Ekuitas (%)	Naik/ (Turun)	Skor
2017	-49.324.546.140,65	110.730.489.182,57	-44,54	13,67	-
2018	-26.920.670.195,19	87.203.858.325,05	-30,87		-

Sumber : Neraca dan Laporan Operasional RSUD ABC, data diolah (2019)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 6, menunjukkan nilai rasio di bawah 1 dan bernilai negatif yaitu -44,54% untuk tahun 2017 dan -30,87% untuk tahun 2018. Nilai rasio yang dihasilkan negatif karena RSUD ABC mengalami defisit selama 2 tahun terakhir, sehingga instansi dinilai belum mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan.

7. Menghitung Perputaran Persediaan *(Inventory Turn Over)*

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Perputaran Persediaan

Tahun	Total Persediaan x 365 (Rp)	Pendapatan BLUD (Rp)	Perputaran Persediaan (hari)	Naik/ (Turun)	Skor
2017	2.002.771.868.110	26.320.144.374,35	76,09	(55,65)	0
2018	2.233.294.802.770	109.234.571.451,18	20,44		1

Sumber : Neraca dan Laporan Operasional RSUD ABC, data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 7, hasil perhitungan Rasio Perputaran Persediaan yang dihasilkan RSUD ABC tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 55,65 dari tahun sebelumnya. Turunnya nilai rasio meningkatkan skor yang diperoleh oleh RSUD ABC. Hal ini menunjukkan kemampuan instansi untuk memperoleh pendapatan melalui pengelolaan persediaan semakin baik karena perputaran waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi pendapatan relatif lebih singkat. Skor yang diperoleh untuk tahun 2017 adalah 0 karena berada pada tingkat PP > 60, dan skor 1 untuk tahun 2018 karena berada pada tingkat 15 < PP $\leq$ 25.

8. Menghitung Rasio PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terhadap Biaya Operasional

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional

Tahun	Pendapatan PNBP (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Rasio PNBP thd Biaya Operasional (%)	Naik/ (Turun)	Skor
2017	23.146.087.763,35	72.470.433.904,00	31,94	42,09	1,25
2018	76.725.261.080,18	103.645.608.775,37	74,03		2,5

Sumber : Laporan Operasional RSUD ABC, data diolah (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional pada Tabel 8, terjadi peningkatan nilai rasio sebesar 42,09% pada tahun 2018 karena adanya peningkatan pendapatan yang dihasilkan RSUD ABC. Persentase yang dihasilkan pada perhitungan Tabel 8 untuk tahun 2017

memperoleh skor 1,25 karena berada pada tingkatan 28 < PB ≤ 35, dan skor 2,5 untuk tahun 2018 karena berada pada tingkatan PB > 65.

9. Menghitung Rasio Subsidi Biaya Pasien

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Subsidi Biaya Pasien

Tahun	Jumlah Subsidi Biaya Pasien	Pendapatan BLUD (Rp)	Rasio Subsidi Biaya Pasien (%)	Skor
2017	-	26.320.144.374,35	0	-
2018	-	109.234.571.451,18	0	-

Sumber : Laporan Operasional RSUD ABC, data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 9, Rasio Subsidi Biaya Pasien periode 2017-2018 menunjukkan nilai 0%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya biaya subsidi untuk pasien yang dikeluarkan oleh RSUD ABC, sehingga Rasio Subsidi Biaya Pasien 0.

Hasil Penilaian Kinerja

Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Analisis Rasio Keuangan

No	Jenis Rasio	Skor Indikator	Skor	
			2017	2018
1	Rasio Kas	2	0,25	0,25
2	Rasio Lancar	2,5	0,25	0,25
3	Rasio Periode Penagihan Piutang	2	0	0,5
4	Perputaran Aset Tetap	2	1	2
5	Imbalan atas Aset Tetap	2	-	-
6	Imbalan atas Ekuitas	2	-	-
7	Perputaran Persediaan	2	0	1
8	Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional	2,5	1,25	2,5
9	Rasio Subsidi Biaya Pasien	2	-	-
	Total skor	19	2,75	6,5

Berdasarkan tabel di atas, kemudian penulis menyimpulkan ke dalam Tabel Hasil Penilaian Kinerja Keuangan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja keuangan RSUD ABC, sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Penilaian Kinerja Keuangan

Tahun (1)	Total Skor (2)	Skor Maksimum (3)	Kinerja Pertahun (2)/(3) x 100%
2017	2,75	19	14,47%
2018	6,5		34,21%

Sumber : Data diolah (2019)

Hasil penilaian kinerja keuangan pada RSUD ABC menunjukkan nilai kinerja keuangan yang dimiliki RSUD ABC masih sangat rendah, terlihat dari minimnya skor yang diperoleh pada Tabel 10 dan Tabel 11. RSUD ABC belum mampu memperoleh skor maksimum yang ditetapkan pada indikator skor yang ditetapkan di peraturan hampir di seluruh rasio keuangan. Pada tahun 2017 seluruh skor yang dihasilkan dari setiap jenis rasio belum mencapai predikat skor maksimum. Skor yang diperoleh meningkat pada tahun 2018, yaitu untuk Rasio Perputaran Aset Tetap dan Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional memperoleh skor maksimum.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan RSUD ABC mengalami peningkatan pada tahun 2018. Meskipun demikian, peningkatan yang terjadi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan RSUD ABC, terlihat dari bobot/persentase yang dihasilkan. Kinerja keuangan RSUD ABC hanyamampu mencapai tingkat skor 2,75 atau mencapai 14,47% dari skor maksimum pada tahun 2017. Pada tahun 2018, RSUD ABC memperoleh skor 6,5 atau hanya mencapai 34,21% dari skor maksimum. Artinya, kinerja keuangan yang diperoleh RSUD ABC selama 2 tahun terakhir tergolong tidak baik, sehingga RSUD ABC perlu memperbaiki pengelolaan keuangan untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan RSUD ABC, maka penulis menarik kesimpulan bahwa hasil analisis Rasio Kas dan Rasio Lancar menunjukkan kemampuan RSUD ABC dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar termasuk kas dan setara kas yang dimiliki tergolong kurang baik. Hal tersebut terlihat dari rasio yang dihasilkan masih juah dari kisaran nilai pada skor standar.

Berdasarkan analisis rasio keuangan tahun 2017-2018, hasil analisis Rasio Imbalan atas Aset Tetap, Imbalan Ekuitas, dan Rasio Subsidi Biaya Pasien menunjukkan kondisi keuangan RSUD ABC tergolong kurang baik, bahkan Rasio Imbalan Aset Tetap dan Imbalan Ekuitas menghasilkan nilai negatif. Hal tersebut dikarenakan biaya yang dikeluarkan instansi lebih besar dari pendapatan yang diperoleh sehingga menyebabkan terjadinya defisit.

Hasil analisis Rasio Periode Penagihan Piutang, Rasio Perputaran Aset Tetap, Rasio Perputaran Persediaan, dan Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional pada tahun 2017-2018, nilai rasio dan skor yang dihasilkan RSUD ABC mengalami peningkatan. RSUD ABC mulai memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola aset tetap dan efektivitas biaya operasional untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, kemampuan rumah sakit dalam menagih piutang dan pengelolaan persediaan juga menunjukkan adanya perkembangan, tetapi masih perlu adanya perhatian dari pihak manajemen untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaannya.

Hasil penilaian kinerja keuangan secara keseluruhan, menunjukkan total skor yang dihasilkan RSUD ABC pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 2,75 dan 6,5 dari total skor maksimum 19. Artinya, kinerja keuangan RSUD ABC hanya mampu mencapai 14,47% untuk tahun 2017 dan 34,21% untuk tahun 2017 dari total skor maksimum yang ditetapkan di Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah RSUD ABC sebaiknya mampu meningkatkan tingkat likuiditas, yaitu dengan meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan aset lancar termasuk kas dan setara kas sehingga akan memperbaiki Rasio Lancar dan Rasio Kas rumah sakit. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas perolehan dan penggunaan kas, meningkatkan kemampuan pengumpulan piutang, dan juga mengurangi pinjaman kepada pihak lain.

RSUD ABC sebaiknya juga meningkatkan jumlah perolehan pendapatan dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan tinjauan kembali terhadap tarif yang ditetapkan, menghasilkan pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain-lain, serta melakukan pengendalian biaya dalam kegiatan operasional. Peningkatan pendapatan serta penekanan biaya akan meminimalkan terjadinya defisit dan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan.

Menjadikan kinerja keuangan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang guna mendukung peningkatan kinerja keuangan.

REFERENSI

Direktur Jenderal Perbendaharaan. 2016. Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan. Jakarta. http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publicatiom/regulatiom/view&id=289. Diakses pada 3 Mei 2019.

Direktur Politeknik Negeri Lampung. 2008. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Politeknik Negeri Lampung. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Politeknik Negeri Lampung. Lampung.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161111.pdf. Diakses pada 14 Mei 2019.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU32-2004Pemda.pdf. Diakses pada 24 Juni 2019.